

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI DI.YOGYAKARTA DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN MANFAATNYA BAGI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

Oleh: Juniraharjo dan Y.Sri Pudyatmoko

### **ABSTRAK**

Dalam rangka memenuhi tuntutan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada, pemerintah harus melakukan penataan secara struktural. Hal ini dilakukan antara lain dengan penataan organisasi birokrasi. Upaya tersebut dilakukan secara dinamis. Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta, sebagai salah satu pemerintah daerah juga harus melakukan hal serupa. Penelitian untuk mengetahui penataan organisasi birokrasi ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder, di mana pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Penataan organisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta antara lain didasarkan pada hasil evaluasi yang menemukan adanya tumpang tindih fungsi organisasi, di samping ada pula kekosongan pihak yang menangani persoalan tertentu. Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta juga melakukan penataan birokrasi dengan membangun komitmen bersama dalam pelayanan masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan begitu baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas layanan.

**Kata kunci: Penataan, Organisasi, Manfaat, Pelayanan masyarakat.**

Tuntutan masyarakat terus mengalami perkembangan, hal ini seiring dengan kenyataan yang ada, di mana kebutuhan masyarakat terus mengalami pertumbuhan. Tuntutan tersebut tak pelak lagi juga dialamatkan kepada pemerintah untuk memenuhinya, oleh karena itu menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, bahwa pemerintah dituntut untuk secara aktif, kreatif, inovatif, sekaligus realistis mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kesejahteraan sebagaimana dikatakan Franz Magnis Suseno, dapat dirumuskan baik secara negative maupun secara positif. Secara negatif, manusia disebut sejahtera apabila ia bebas dari perasaan lapar dan dari kemiskinan, dari kecemasan akan hari esok, bebas

dari perasaan takut, dari penindasan, apabila ia tidak merasa diperlakukan dengan tak adil. Secara positif manusia dapat disebut sejahtera apabila ia merasa aman, tenteram, selamat, apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Apabila kemampuan dan kreativitasnya, meskipun terbatas bisa dikembangkannya, apabila ia merasa tenang dan bebas.<sup>1</sup>

Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang tertentu untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Dalam suatu negara yang demokratis berlaku

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.315

